



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2021**



**SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI**

**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA**

2022

KATA PENGANTAR

Sebagai insan yang beriman dan bertaqwa, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan yang prima sehingga dapat mengemban tugas untuk mewujudkan cita-cita bangsa ke arah kemajuan, kesejahteraan dan keadilan di segala bidang kehidupan.

Pada masa periode Renstra 2020-2024 ini Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (Sekretariat BPSDMI) sebagai unit Eselon II di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) mempunyai tugas penting mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPSDMI. Untuk itu, diperlukan sinergitas dan koordinasi dengan seluruh bagian di lingkungan BPSDMI khususnya agar seluruh sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam berbagai dokumen perencanaan, dapat tercapai secara optimal.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Sekretariat BPSDMI selama tahun 2021, disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Tahun 2021 sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan tiap pimpinan Kementerian/Lembaga Pemerintahan, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja di dalamnya, membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya.

Mudah-mudahan, penyajian Lakip ini menjadi cermin bagi aparatur khususnya aparatur Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif, dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Jakarta, Januari 2022

Sekretaris BPSDMI



Yedi Sabaryadi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi	2
1.3 Struktur Organisasi	3
1.4 Sistematika Penyajian	5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	6
2.1 Perencanaan Kinerja	6
2.1.1 Rencana Strategis Organisasi	6
2.1.2 Rencana Kinerja	11
2.1.3 Indikator Utama Sekretariat BPSDMI	13
2.2 Dukungan Anggaran	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021	14
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	14
3.1.1 Pengukuran Capaian Kinerja Jangka Menengah	14
3.1.2 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021	17
3.1.3 Capaian Kinerja Tahun 2021	19
3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2021	39
3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	43
3.4 Kendala dan Tindak Lanjut	44
3.4.1 Kendala	44
3.4.2 Tindak Lanjut	44
BAB IV PENUTUP	46

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat BPSDMI Kementerian Perindustrian ini disusun sebagai pertanggungjawaban kinerja Sekretariat BPSDMI Kementerian Perindustrian selama tahun 2021. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dimana pimpinan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja didalamnya, diminta untuk membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada pimpinan yang lebih tinggi.

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat BPSDMI Kementerian Perindustrian 2020-2024 pada intinya mengimplementasikan Kebijakan Industri Nasional serta melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Kementerian Perindustrian khususnya dalam peningkatan kualitas SDM Industri dan peningkatan kualitas Pendidikan Vokasi Industri. Renstra memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan serta anggaran indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat BPSDMI.

Dalam melaksanakan tugas tugas pokok dan fungsinya khususnya dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia industri, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri pada tahun 2021 telah melakukan program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri 2021. Secara umum dapat dikatakan bahwa kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan 2021 sudah dapat dicapai oleh Sekretariat BPSDMI. Hal tersebut nampak pada tingkat persentase dari pencapaian target sasaran baik fisik maupun anggaran yang telah dijalankan selama periode tahun anggaran berjalan.

Secara umum keseluruhan capaian kinerja Sekretariat BPSDMI telah tercapai dan telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Sekretariat BPSDMI untuk selalu meningkatkan kinerja yang lebih baik di masa-masa mendatang. Sekretariat BPSDMI akan selalu berusaha meningkatkan pelayanan kesekretariatan sesuai dengan sasaran tujuan yaitu “Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima”.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI), tidak terlepas dari perjalanan panjang sejarah Kementerian Perindustrian dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian Perindustrian membawa negara Indonesia menjadi negara industri tangguh di dunia.

Sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas BPSDMI di bidang pembinaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia (SDM) aparatur dan sumber daya manusia (SDM) industri, Sekretariat BPSDMI memiliki peran penting dalam melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPSDMI. Peran penting tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian. Oleh karena itu Sekretariat BPSDMI dituntut untuk selalu belajar dan beradaptasi secara lebih cepat, dengan mengintegrasikan seluruh sumber daya, proses bisnis dan pihak- pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan organisasi.

Dalam upaya mempersiapkan dan mewujudkan birokrasi BPSDMI yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima, Sekretariat BPSDMI pada tahun anggaran 2021, telah melakukan berbagai pelayanan administratif kepada Unit Kerja di bawah BPSDMI diantaranya adalah menyelenggarakan dukungan teknis dan administratif yang optimal dan meningkatkan kinerja organisasi yang prima melalui dukungan SDM yang profesional dan sarana prasarana yang memadai.

Sesuai dengan amanah Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Negara/ Lembaga yang mencakup entitas Kementerian Negara/ Lembaga, Unit Organisasi sampai dengan Satuan Kerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat BPSDMI Kementerian Perindustrian Tahun 2021, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

LAKIP Sekretariat BPSDMI ini disusun secara komprehensif, objektif, jujur, akurat, dan transparan, sesuai dengan lingkup tanggung jawab, prioritas, dan manfaat diklat bagi aparatur perindustrian. LAKIP ini disusun bersifat rutin sekali dalam setahun, dan disampaikan secara bertahap dan berjenjang pada setiap akhir tahun anggaran. Sehingga dengan demikian LAKIP ini selain berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Sekretariat BPSDMI juga dapat dijadikan bahan oleh Pimpinan untuk mengambil keputusan, utamanya dalam upaya peningkatan mutu pelayanan sehingga mewujudkan manajemen sekretariat yang profesional.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, tugas Sekretariat BPSDMI adalah melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPSDMI. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat BPSDMI menyelenggarakan fungsi:

- a) koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan;
- b) koordinasi dan pelaksanaan urusan hukum dan kerja sama;
- c) koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
- d) koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan;
- e) koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana;
- f) koordinasi dan pelaksanaan urusan kearsipan, pelayanan publik, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan
- g) koordinasi dan pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, tata usaha, dan manajemen kinerja badan

Dengan optimalisasi pelaksanaan fungsi tersebut, diharapkan penyelenggaraan tugas-tugas BPSDMI sebagai unit eselon I dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan sasaran dan target yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, setiap Pimpinan Kementerian/Lembaga melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Renja-KL yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dilakukan terhadap perkembangan realisasi penyerapan dana, realisasi pencapaian target keluaran (output), dan kendala yang dihadapi.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPSDMI menetapkan visi **“Menjadi vokasi industri bertaraf global untuk mendukung pembangunan industri nasional yang berdaya saing dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara industri tangguh”**.

Dengan memperhatikan visi BPSDMI, maka Sekretariat BPSDMI Kementerian Perindustrian menetapkan visi **“Terwujudnya Manajemen Sekretariat yang Profesional”**

Sebagai penjabaran dari visi dan misi yang telah ditetapkan, telah dirumuskan berbagai kebijakan sebagai arah/tindakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan, yang tertuang ke dalam Rencana Strategis BPSDMI 2020-2024. Arah kebijakan tersebut meliputi:

- 1) Mewujudkan perencanaan yang sistematis, efektif dan efisien.
- 2) Mewujudkan tata kelola keuangan yang baik dan benar.
- 3) Mewujudkan pelayanan prima di bidang hukum dan kerjasama.
- 4) Mewujudkan layanan kepegawaian dengan sistem tepat waktu dan menciptakan SDM aparatur yang terampil dan profesional serta memiliki kompetensi sesuai dengan tuntutan tugas.
- 5) Menyediakan sarana dan prasarana kerja pegawai sesuai dengan kebutuhan.

Dalam rangka mewujudkan arah kebijakan serta sasaran-sasaran yang akan dicapai, Sekretariat BPSDMI telah melaksanakan 1 program yaitu Program Dukungan Manajemen.

1.3 Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun

2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri dipimpin oleh Sekretaris BPSDMI yang membawahi 1 (satu) Unit Eselon III dan Kelompok Jabatan Fungsional, yang terdiri atas:

a) Bagian Umum

Bagian umum Memiliki tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik Negara, kearsipan, persuratan, dan manajemen kinerja badan.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik Negara, kearsipan, dan persuratan badan; dan
- Pelaksanaan urusan manajemen kinerja badan.

b) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

Struktur organisasi BPSDMI Kementerian Perindustrian berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021, dapat dilihat pada Gambar 1.1 di bawah ini:



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Sekretariat BPSDMI

1.4 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya LAKIP ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Sekretariat BPSDMI selama tahun 2021. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Sistematika penyajian laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat BPSDMI Kementerian Perindustrian tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, arah kebijakan dan struktur organisasi BPSDMI.

Bab II – Perencanaan Kinerja

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Sekretariat BPSDMI tahun 2021 meliputi Renstra Sekretariat BPSDMI 2020- 2024, Rencana Kinerja, dan Penetapan Kinerja Tahun 2021.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Sekretariat BPSDMI dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2021.

Bab IV – Penutup

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari LAKIP Sekretariat BPSDMI tahun 2021 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Kinerja

2.1.1 Rencana Strategis Organisasi

Rencana strategis (Renstra) Sekretariat BPSDMI 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah Sekretariat BPSDMI yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Sekretariat BPSDMI beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi, dan peran yang diamanahkan.

Namun sejalan dengan berjalannya tahun anggaran 2021 terdapat perubahan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Perindustrian No. 7 Tahun 2021, Kementerian Perindustrian perlu menyesuaikan rencana strategis periode 2020-2024 dengan mengacu kepada perubahan tersebut. Atas dasar tersebut, Sekretariat BPSDMI perlu juga menyesuaikan rencana strategis periode 2020-2024, sehingga rencana strategis Sekretariat BPSDMI dapat sejalan dengan rencana strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri dan rencana strategis Kementerian Perindustrian

Penyusunan Renstra Sekretariat BPSDMI telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan kebijakan pengembangan industri nasional khususnya di bidang pengembangan sumber daya manusia dan sumber daya manusia industri. Secara ringkas substansi Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri dapat diilustrasikan sebagai berikut:

A. Visi

Visi dan misi BPSDMI disusun dengan menyelaraskan visi dan misi Kemenperin dengan tugas dan fungsi BPSDMI, serta kondisi SDM industri yang ingin dicapai pada akhir 2024, seperti yang termaktub di dalam buku Pengembangan Vokasi Industri Bertaraf Global Menuju “Corporate University” BPSDMI Kementerian Perindustrian.

Selain itu, penyusunan visi dan misi BPSDMI juga mempertimbangkan capaian kinerja, kondisi internal dan eksternal (potensi dan permasalahan), arah organisasi ke depan, serta aspirasi dari stakeholders terkait. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka visi BPSDMI ditetapkan sebagai berikut: **“Menjadi vokasi industri bertaraf global untuk mendukung pembangunan industri nasional yang berdaya saing dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara industri tangguh.”** Dengan memperhatikan Visi BPSDMI, maka Sekretariat BPSDMI Kementerian Perindustrian menetapkan visi **“Terwujudnya Manajemen Sekretariat yang Profesional”**.

Sejalan dengan visi tersebut, Sekretariat BPSDMI juga senantiasa menjunjung nilai-nilai yang telah ditetapkan bagi pegawai Kemenperin untuk menjadi manusia yang berintegritas, mau bekerja keras, dan semangat bergotong royong yang diharapkan berdampak positif bagi pertumbuhan industri di Indonesia. Nilai-nilai tersebut terdiri dari integritas, profesional, inovatif, produktif, dan kompetitif. Lima nilai ini disebut INSAN OKE yang harus diketahui, dipahami, dan diamalkan oleh semua aparatur Kemenperin ketika bekerja, bersikap, dan berkontribusi dalam pengembangan industri nasional.

B. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, dirumuskan 3 (tiga) misi pembangunan BPSDMI sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan dukungan teknis dan administratif yang optimal;
2. Meningkatkan kinerja organisasi yang prima melalui dukungan SDM yang profesional dan sarana prasarana yang memadai; dan
3. Membangun wadah (hub center) sinergi, kolaborasi, dan kerja sama dengan seluruh stakeholder nasional dan global dalam mengembangkan vokasi industri.

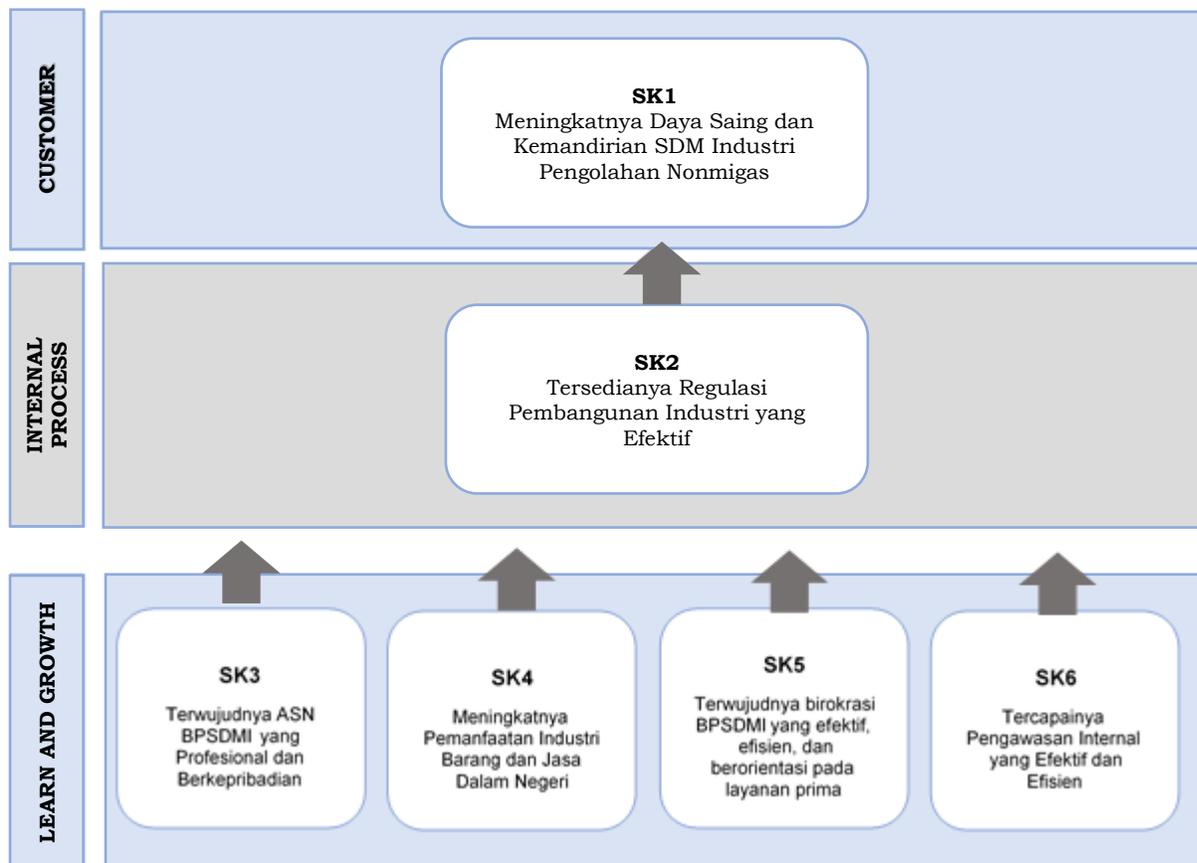
C. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi seperti disebutkan di atas, Sekretariat BPSDMI menetapkan sasaran tujuan sebagai berikut: **“Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri**

yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima.” Dengan indikator kinerja tujuan sebagai berikut : **Tingkat Kepuasan Pegawai atas Pelayanan Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.**

D. Sasaran Program BPSDMI 2020-2024

Sasaran program Sekretariat BPSDMI merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Sekretariat BPSDMI sebagai suatu *impact/outcome* dari rangkaian program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BPSDMI. Dalam penyusunannya, Sekretariat BPSDMI menjabarkan masing-masing sasaran program dengan menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi ke dalam empat perspektif, yaitu *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Sasaran program tersebut diukur melalui indikator kinerja program. Peta strategi BPSDMI dapat dilihat pada gambar di bawah.



Gambar Peta Strategi Sekeretariat BPSDMI Tahun 2020-2024

Perspektif Pelanggan (*Customer Prespective*)

Sasaran kegiatan pertama (SK1) yang akan dicapai yaitu “Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas”, dengan indikator kinerja:

1. Jumlah tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas.
2. Persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas terhadap total pekerja.
3. Produktivitas tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas.

Perspektif Proses Internal (*Internal Process Perspective*)

Sasaran kegiatan kedua (SK2), yaitu “Tersedianya regulasi pembangunan industri yang efektif”, dengan indikator kinerja:

1. Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan BPSDMI.

Perspektif Pembelajaran Organisasi (*Learning and Growth Perspective*)

Sasaran kegiatan ketiga (SK3), yaitu: “Terwujudnya ASN Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang Profesional dan Berkepribadian”, dengan indikator kinerja:

1. Rata-rata Indeks Kompetensi profesional ASN BPSDMI.

Sasaran kegiatan keempat (SK4), yaitu “Meningkatnya pemanfaatan industri barang dan jasa dalam negeri”, dengan indikator kinerja:

1. Persentasi nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BPSDMI.

Sasaran kegiatan kelima (SK5), yaitu: “Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima”, dengan indikator kinerja:

1. Nilai laporan keuangan BPSDMI.
2. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah (SAKIP) BPSDMI.
3. Nilai kearsian BPSDMI.

Sasaran kegiatan keenam (SK6), yaitu “Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien”, dengan indikator kinerja:

1. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti.
2. Level Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI).

E. Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat BPSDMI

Sebagai penjabaran dari visi dan misi yang telah ditetapkan, telah dirumuskan berbagai kebijakan sebagai arah/tindakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan, yang tertuang ke dalam Rencana Strategis BPSDMI 2020-2024. Arah kebijakan tersebut meliputi:

- 1) Mewujudkan perencanaan yang sistematis, efektif dan efisien.
- 2) Mewujudkan tata kelola keuangan yang baik dan benar.
- 3) Mewujudkan pelayanan prima di bidang hukum dan kerjasama.
- 4) Mewujudkan layanan kepegawaian dengan sistem tepat waktu dan menciptakan SDM aparatur yang terampil dan profesional serta memiliki kompetensi sesuai dengan tuntutan tugas.
- 5) Menyediakan sarana dan prasarana kerja pegawai sesuai dengan kebutuhan.

F. Program dan Kegiatan

Sekretariat BPSDMI Kementerian Perindustrian menetapkan 1 program yang dilaksanakan yaitu Program Dukungan Manajemen melalui kegiatan yaitu Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri.

Adapun kegiatan rincian output (KRO) BPSDMI yang dilakukan untuk mencapai kegiatan dan program tersebut:

1. Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (6043)

- a. Layanan Perkantoran (EAA)
 - Layanan Perkantoran BPSDMI Pusat
 - Layanan Perkantoran Politeknik Industri
 - Layanan Perkantoran SMK Industri
 - Layanan Perkantoran Balai Diklat Industri
- b. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal (EAB)
 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal BPSDMI Pusat
 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal Politeknik Industri
 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal SMK Industri
 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal Balai Diklat

- c. Layanan Sarana Internal (EAC)
 - Layanan Sarana dan Prasarana BPSDMI Pusat
 - Layanan Sarana dan Prasarana Politeknik Industri
 - Layanan Sarana dan Prasarana SMK Industri
 - Layanan Sarana Prasarana Balai Diklat industri
- d. Bantuan Produk (QEC)
 - Bantuan Masker Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan PPKM

2.1.2 Rencana Kinerja

Rencana Kinerja Tahun 2021 ini merupakan pembabakan dan penjabaran dari Renstra Sekretariat BPSDMI, dan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Sekretariat BPSDMI selama satu tahun. Untuk dapat mengukur keberhasilan dari implementasi Rencana Kinerja Tahun 2021, Sekretariat BPSDMI menetapkan target untuk masing-masing sasaran yang harus dicapai. Target ditetapkan untuk setiap indikator kinerja.

Pada tahun 2021 BPSDMI melakukan revisi perjanjian kinerja sehingga Sekretariat BPSDMI selaku unit eselon II di bawah BPSDMI juga melakukan penyesuaian dengan melakukan revisi rencana strategis dan rencana kinerja 2021 dengan indikator sebagai berikut:

- **Tujuan**

Sasaran Tujuan Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima, dengan Indikator Tujuan Tingkat Kepuasan Pegawai atas Pelayanan Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri dengan nilai 72.

- **Perspektif Customer**

- **Sasaran Kegiatan 1** Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian SDM Industri Pengolahan Nonmigas, dengan indikator kinerja:
 1. Tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas 18,29 Juta Orang
 2. Persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan non migas terhadap total pekerja sebanyak 13,96%

3. Produktivitas tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas sebesar 115,46 Rp Juta/orang/tahun
- **Sasaran kegiatan 2** Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0, dengan indikator kinerja:
 1. Utilisasi Pusat Industri Digital Indonesia 4.0 sebesar 50%
 - **Perspektif Internal Process**
 - **Sasaran kegiatan 3 Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif, dengan indikator kinerja:**
 1. Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan BPSDMI sebesar 74%
 - **Perspektif Learn & Growth**
 - **Sasaran kegiatan 4** Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian, dengan indikator kinerja:
 1. Rata-rata Indeks kompetensi Profesionalitas ASN BPSDMI dengan indeks 71
 - **Sasaran kegiatan 5** Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri, dengan indikator kinerja:
 1. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BPSDMI sebesar 50%
 - **Sasaran kegiatan 6** Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima, dengan indikator kinerja:
 1. Nilai Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri senilai 72
 2. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri senilai 72
 3. Nilai kearsipan Badan Pengembangan SDM Industri senilai 75
 - **Sasaran Kegiatan 7** Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien, dengan indikator kinerja:
 1. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti sebesar 91,5%

2. Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI) selevel 3

2.1.3 Indikator Kinerja Utama Sekretariat BPSDMI

Dari sasaran program dan indikator kinerja diatas, Sekretariat BPSDMI menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

1. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BPSDMI dengan target 50%

2.2 Dukungan Anggaran

Untuk mewujudkan kinerja Sekretariat BPSDMI tahun anggaran 2021 alokasi anggaran sebesar 130.509.712.000 yang digunakan untuk membiayai kegiatan Program Dukungan Manajemen, dengan rincian sebagai berikut:

Kegiatan	Output	Pagu (Rp)
6043 Pengelolaan Manajemen Keseekretariatan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	6043.EAA Layanan Perkantoran	Rp 30.671.346.000
	6043.EAB Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Rp 11.188.366.000
	6043.EAD Layanan Sarana Internal	Rp 1.150.000.000
	6043.QEC Bantuan Produk	Rp 87.500.000.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Pengukuran Capaian Kinerja Jangka Menengah

Sekretariat BPSDMI sebagai unit Eselon II di bawah BPSDMI mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPSDMI. Dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan dalam Naskah Revisi Rencana Strategis (Renstra) BPSDMI Tahun 2020-2024, Naskah Revisi Renstra Sekretariat BPSDMI merupakan penjabaran dari Naskah Revisi Rencana Strategis (Renstra) BPSDMI Tahun 2020-2024 dan disusun dengan pedoman Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 6/ 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 5/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 dan Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Nomor 319 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Nomor 61 tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Tahun 2020 – 2024.

Target Kinerja Sekretariat BPSDMI 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target Baru				
			2020	2021	2022	2023	2024
Tj	Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima						
	Tingkat Kepuasan Pegawai atas Pelayanan Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	Nilai	70	72	74	75	76
SK1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian SDM Industri Pengolahan Nonmigas						
	1 Tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas	Juta Orang	17,44	18,29	20,84	21,34	21,94

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK		Satuan	Target Baru				
				2020	2021	2022	2023	2024
	2	Persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan non migas terhadap total pekerja	Persen	13,58	13,96	14,96	15,26	15,65
	3	Produktivitas tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas	Rp Juta /orang/ tahun	111,66	115,46	115,77	120,38	124,73
SK2	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif							
	1	Efektivitas Regulasi terkait SDM Industri	Persen	-	72	74	78	78
SK3	Terwujudnya ASN Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang Profesional dan Berkepribadian							
	1	Rata-rata Indeks Kompetensi Profesionalitas ASN BPSDMI	Indeks	70	71	73	76	80
SK4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri							
	1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Sekretariat BPSDMI	Persen	-	50	60	70	80
SK5	Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima							
	1	Nilai laporan keuangan badan Pengembangan SDM Industri	Nilai	70	72	74	76	78
	2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah (SAKIP) Badan Pengembangan SDM Industri	Nilai	70	72	74	76	78
	3	Nilai kearsipan Badan Pengembangan SDM Industri	Nilai	0	75	77	79	80
SK6	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien							
	1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti	Persen	91	91,5	92	92,5	93
	2	Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian	Level	3	3	3	4	4

Rencana anggaran Sekretariat BPSDMI 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK		Alokasi (dalam milyar rupiah)					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
SK1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian SDM Industri Pengolahan Nonmigas							
	1	Tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas	0	0	0	0	0	0
	2	Persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan non migas terhadap total pekerja	0	0	0	0	0	0
	3	Produktivitas tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas	0	0	0	0	0	0
SK2	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif							
	1	Efektivitas Regulasi terkait SDM Industri	0	0.48	0.58	1.38	1.50	1.50
SK3	Terwujudnya ASN Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang Profesional dan Berkepribadian							
	1	Rata-rata Indeks Kompetensi Profesionalitas ASN BPSDMI	2.10	1.17	1.05	2.34	2.50	2.50
SK4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri							
	1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Sekretariat BPSDMI	59.61	4.63	92.12	6.39	7,0	7,0
SK5	Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima							
	1	Nilai laporan keuangan badan Pengembangan SDM Industri	0.93	1.44	1.10	3.36	4	4
	2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah (SAKIP) Badan Pengembangan SDM Industri	4.01	2.54	3.83	5.88	5.25	5.25
	3	Nilai kearsipan Badan Pengembangan SDM Industri	0.15	0.13	0.60	0.80	1,00	1,00
SK6	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien							
	1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti	0.42	0.33	0.37	0.36	0.50	0.50
	2	Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian	0	0.08	0.17	0.12	0.25	0.25

3.1.2 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021

Pengukuran kinerja dilakukan dengan sistematis dan berkesinambungan yang ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses pengukuran kinerja ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi Sekretariat BPSDMI yaitu "**Terwujudnya Manajemen Sekretariat yang Profesional**".

Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat BPSDMI tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Sekretariat BPSDMI tahun 2021 dengan realisasinya. Secara umum dapat dikatakan bahwa kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan 2021 sudah dapat dicapai oleh Sekretariat BPSDMI. Hal tersebut nampak pada tingkat persentase dari pencapaian target sasaran baik fisik maupun anggaran. Namun, di era pandemi Covid-19 ini, terdapat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sehingga pelaksanaan kegiatan prioritas banyak yang belum maksimal serta terdapat pula *refocusing* anggaran untuk penanggulangan Covid-19 yang menyebabkan perlu dilakukannya penyesuaian output indikator kinerja.

Dokumen Perjanjian Kinerja ini sebagaimana pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji yang harus dilakukan oleh pimpinan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri dan merupakan tolok ukur akuntabilitas kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri pada akhir tahun 2021 yang disusun berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2021 yang telah

ditetapkan dengan rincian tabel sebagai berikut:

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	TARGET	SATUAN	REALISASI	CAPAIAN	
SK.1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian SDM Industri Pengolahan Nonmigas	1	Tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas	18.29	Juta Orang	18.65	101.97%
		2	Persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan non migas terhadap total pekerja	13.96	Persen	14.23	101.93%
		3	Produktivitas tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas	115.46	Rp Juta /orang/ tahun	111.47	96.54%
SK.2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	1	Utilisasi Pusat Industri Digital Indonesia 4.0	50	Persen	65.77	131.54%
SK.3	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	1	Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan BPSDMI	74	Persen	62.5	86,81%
SK.4	Terwujudnya ASN Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang Profesional dan Berkepribadian	1	Rata-rata Indeks Kompetensi Profesionalitas ASN BPSDMI	71	Indeks	66.43	93.56%
SK.5	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Sekretariat BPSDMI	50	Persen	56	110.00%
SK.6	Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	1	Nilai Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	72	Nilai	70	97.22%
		2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	72	Nilai	73.15	101.60%
		3	Nilai kearsipan Badan Pengembangan SDM Industri	75	Nilai	69	92,00%
SK.7	Tercapainya Pengawasan Internal yang	1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti	91,5	Persen	61.49	67.20%

	Efektif dan Efisien	2	Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI)	3	Level	2.77	92.33%
--	---------------------	---	--	---	-------	------	--------

3.1.3 Capaian Kinerja Tahun 2021

Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri tahun 2020, terdapat beberapa indikator yang realisasi dibawah target dikarenakan masa pandemic COVID 19 yang mengakibatkan terjadinya pembatasan aktivitas serta terdapat pula beberapa indikator yang terdampak oleh refocusing dan realokasi yang dilaksanakan dilaksanakan di Lingkungan Kementerian Perindustrian yang berakibat pada kurang maksimalnya output yang dihasilkan, detail capaian tersebut berikut:

- **Tujuan**

Sasaran Tujuan Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima, memiliki indikator tujuan:

1. Tingkat Kepuasan Pegawai atas Pelayanan Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri

Target indikator kinerja utama ini pada tahun 2021 adalah dengan nilai 72. Target ini mengetahui tingkat kepuasan pegawai atas pelayanan Sekretariat BPSDMI. Metode pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner untuk mendapatkan penilaian persepsi dan wawancara untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dan baik. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder.

Capaian atau realisasi pada Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan Pegawai atas Pelayanan Sekretariat BPSDMI pada 2021 dengan nilai 72 dan telah memenuhi target yang ditetapkan

Realisasi Indikator Tujuan

SK	IK	2019			2020			2021			Satuan
		T	R	C%	T	R	C%	T	R	C %	
Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	Tingkat kepuasan pegawai atas pelayanan Sekretariat BPSDMI	-	-	-	70	88	125	72	72	100	Nilai

- **Prespektif Customer**

Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian SDM Industri Pengolahan Nonmigas memiliki 5 Indikator Kinerja yaitu:

1. Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Nonmigas

Sehubungan dengan sektor industri merupakan kontributor terbesar dalam PDB, sektor industri diharapkan menjadi leading sector yang mampu mengungkit sektor lainnya serta membuka lapangan pekerjaan. Jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor industri dihitung menggunakan data Sakernas.

Indikator ini merupakan indikator yang baru ditambahkan di perkin Sekretariat BPSDMI pada revisi perkin 2021. Indikator ini merupakan turunan dari renstra kementerian perindustrian yang sumber datanya berasal dari Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dipublikasikan oleh BPS berdasarkan jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor industri pengolahan non migas dari Sakernas yaitu KBLI 10-18 dan 20-33. Data tersebut kemudian diolah oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Perindustrian. Data pada indikator ini dikeluarkan setiap bulan Februari dan Agustus. Sehingga data yang dilaporkan pada laporan ini merupakan data yang dikeluarkan pada Agustus 2021.

Capaian atau realisasi pada Indikator Kinerja Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Nonmigas pada 2021 sebesar 18,65 Juta orang atau 101,97% dari target 18,29 Juta orang. Indikator Kinerja Tenaga Kerja di Sektor

Industri Pengolahan Non Migas telah memenuhi target yang ditetapkan.

Realisasi Indikator Kinerja

SP	IK	2019			2020			2021			Satuan
		T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	
Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian SDM Industri Pengolahan Nonmigas	Tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas	Belum menjadi Indikator Kinerja			Belum menjadi Indikator Kinerja			18,29	18,65	102	Juta Orang

Pada tahun 2019 dan 2020, indikator ini belum dijadikan indikator kinerja oleh BPSDMI. Indikator Kinerja Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Nonmigas baru menjadi indikator kinerja BPSDMI pada tahun 2021. Rincian Indikator Kinerja Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Nonmigas sebagai berikut:

Kode KBLI	Jumlah Tenaga Kerja		
	Aug-20	Feb-21	Aug-21
10	4.817.440	4.806.673	5.016.316
11	392.936	402.663	425.037
12	405.178	327.766	514.019
13	1.101.206	1.034.251	1.129.954
14	2.329.274	2.316.969	2.522.691
15	669.185	726.967	759.471
16	1.616.546	1.512.928	1.689.993
17	241.651	267.387	286.758
18	286.392	306.526	282.050
19	43.260	87.730	46.379
20	333.023	453.483	401.583
21	134.651	178.301	152.411
22	567.748	589.262	569.787
23	1.106.089	1.069.858	1.151.438
24	239.398	219.084	259.290
25	601.535	709.999	667.333
26	151.687	157.154	160.632
27	179.934	192.008	230.936
28	178.219	195.336	201.808
29	200.386	266.902	190.454

Kode KBLI	Jumlah Tenaga Kerja		
	Aug-20	Feb-21	Aug-21
30	208.106	242.275	196.748
31	740.480	844.722	843.940
32	718.236	721.201	771.423
33	220.289	194.123	224.012
Total Tenaga Kerja Industri	17.482.849	17.823.568	18.694.463
Total Tenaga Kerja Industri Nonmigas	17.439.589	17.735.838	18.648.084

Sumber: Pusdatin (diolah)

Tercapainya target tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas didukung oleh kinerja sektor manufaktur yang makin membaik, seperti PDB, realisasi investasi, capaian ekspor, serapan tenaga kerja, dan Purchasing Manager's Index (PMI) Manufaktur. Indikator-indikator tersebut menunjukkan bahwa sektor industri terus berekspansi, bahkan terdapat beberapa sektor yang meningkat performanya di tengah pandemi.

Peningkatan *Purchasing Manager's Index* (PMI) manufaktur dapat teridentifikasi dari kenaikan kegiatan produksi yang dilaksanakan oleh industri. Hal ini akan berbanding lurus dengan pertumbuhan investasi pada berbagai sektor. Dampak dari kenaikan tersebut juga mempengaruhi kebutuhan tenaga kerja yang meningkat.

2. Persentase Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Non Migas Terhadap Total Pekerja

Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas dimaksudkan untuk meningkatkan penjualan produk dalam negeri dibandingkan dengan seluruh pangsa pasar baik dalam negeri maupun luar negeri. Peningkatan daya saing dan kemandirian dilakukan melalui pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi industri yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian industri nasional.

Dengan semakin tingginya penyerapan tenaga kerja di sektor industri nonmigas merupakan salah satu indikasi bahwa industri nasional semakin

mandiri, maju, dan berdaya saing.

Indikator ini merupakan indikator yang baru ditambahkan di perkin BPSDMI pada Desember 2021. Indikator ini merupakan turunan dari renstra kementerian perindustrian yang sumber datanya berasal dari Persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas terhadap total pekerja dihitung menggunakan data Sakernas yaitu Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri pengolahan nonmigas dari Sakernas (yaitu KBLI 10-18 dan 20-33) dibagi Total Tenaga Kerja dikali 100%. Data tersebut kemudian diolah oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Perindustrian. Data pada indikator ini dikeluarkan setiap bulan Februari dan Agustus. Sehingga data yang dilaporkan pada laporan ini merupakan data yang dikeluarkan pada Agustus 2021.

Capaian atau realisasi pada Indikator Kinerja Persentase Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Non Migas Terhadap Total Pekerja pada triwulan IV 2021 sebesar 14,23% atau 101,93% dari target 13,96%. Total Tenaga Kerja 131.050.523 orang dan Total Tenaga Kerja Industri Pengolahan Non Migas 18.646.084 orang. Indikator Kinerja Persentase Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Non Migas Terhadap Total Pekerja telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Realisasi Indikator Kinerja

SP	IK	2019			2020			2021			Satuan
		T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	
Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian SDM Industri Pengolahan Nonmigas	Persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan non migas terhadap total pekerja	Belum menjadi Indikator Kinerja			Belum menjadi Indikator Kinerja			13,96	14,23	101,93	Persen

Pada tahun 2019 dan 2020, indikator ini belum dijadikan indikator kinerja oleh BPSDMI. Indikator Kinerja Persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan non migas terhadap total pekerja baru menjadi indikator kinerja BPSDMI pada tahun 2021. Rincian Indikator Kinerja Persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan non migas terhadap total pekerja sebagai berikut:

Kode KBLI	Jumlah Tenaga Kerja		
	Aug-20	Feb-21	Aug-21
Total Tenaga Kerja Industri	17.482.849	17.823.568	18.694.463
Total Tenaga Kerja Industri Nonmigas	17.439.589	17.735.838	18.648.084
Total Tenaga Kerja	128.454.184	131.064.305	131.050.523
% Tenaga Kerja Industri Nonmigas	13,58	13,53	14,23

Sumber: Pusdatin (diolah)

Tercapainya target indikator Persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas terhadap total pekerja ini didukung oleh kinerja sektor manufaktur yang makin membaik, seperti PDB, realisasi investasi, capaian ekspor, serapan tenaga kerja, dan Purchasing Manager's Index (PMI) Manufaktur. Indikator-indikator tersebut menunjukkan bahwa sektor industri terus berekspansi, bahkan terdapat beberapa sektor yang meningkat performanya di tengah pandemi.

Peningkatan Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur dapat teridentifikasi dari kenaikan kegiatan produksi yang dilaksanakan oleh industri. Hal ini akan berbanding lurus dengan pertumbuhan investasi pada berbagai sektor. Dampak dari kenaikan tersebut juga mempengaruhi kebutuhan tenaga kerja yang meningkat, sehingga secara otomatis persentase tenaga kerja juga akan meningkat.

3. Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas

Semakin tinggi tingkat produktivitas tenaga kerja sektor industri, maka semakin tinggi efisiensi perusahaan dalam memproduksi barang/jasa. Untuk itu, maka penyediaan SDM industri yang terampil menjadi salah satu yang menjadi prioritas untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan daya saing industri nasional.

Nilai produktivitas tenaga kerja sektor industri nonmigas merupakan pembagian antara nilai tambah sektor industri nonmigas dan jumlah tenaga kerja di sektor industri nonmigas.

Indikator ini merupakan indikator yang baru ditambahkan di perkin BPSDMI pada Desember 2021. Indikator ini merupakan turunan dari renstra

kementerian perindustrian yang sumber datanya berasal dari Data PDB dan Sakernas yang dipublikasikan oleh BPS. Produktivitas tenaga kerja sektor industri nonmigas didapatkan dengan pembagian antara PDB industri nonmigas harga konstan dan jumlah tenaga kerja di sektor industri nonmigas. Data tersebut kemudian diolah oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Perindustrian. Data pada indikator ini dikeluarkan setiap bulan Februari dan Agustus. Sehingga data yang dilaporkan pada laporan ini merupakan data yang dikeluarkan pada Agustus 2021. PDB Triwulan IV 2021 belum release sehingga data PDB menggunakan target Renstra Kemenperin. Sehingga Indikator Kinerja Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas pada laporan ini merupakan hasil proyeksi yang dihitung oleh Pusdatin.

Capaian atau realisasi pada Indikator Kinerja Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas pada triwulan IV 2021 sebesar 111,6 Rp Juta/orang/tahun atau 96,62% dari target 115,46. Indikator Kinerja Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

Belum terpenuhinya target pada Indikator Kinerja ini disebabkan karena peningkatan jumlah tenaga kerja yang belum sebanding dengan peningkatan PDB ADHK yang sebagian besar dipengaruhi oleh pandemic Covid-19.

Realisasi Indikator Kinerja

SP	IK	2019			2020			2021			Satuan
		T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	
Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian SDM Industri Pengolahan Nonmigas	Produktivitas tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas	Belum menjadi Indikator Kinerja			Belum menjadi Indikator Kinerja			115,5	111,6	96,62	Rp Juta /orang/ tahun

Pada tahun 2019 dan 2020, indikator ini belum dijadikan indikator kinerja oleh BPSDMI. Indikator Kinerja Produktivitas tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas baru menjadi indikator kinerja BPSDMI pada tahun 2021. Rincian Indikator Kinerja Produktivitas tenaga kerja sektor industri pengolahan

nonmigas sebagai berikut:

Data	2020	2021
PDB ADHK (Rp Juta)	2.007.316.600	2.081.054.800
Tenaga Kerja (Orang)	17.439.589	18.648.084
Produktivitas TK (Rp Juta/Orang/Tahun)	115,1	111,6

Sumber: Pusdatin (diolah)

Belum tercapainya indikator produktivitas tenaga kerja sektor industri nonmigas disebabkan karena pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, sehingga perlu dilakukan pembatasan sebagai upaya penanggulangan COVID-19. Upaya tersebut menyebabkan terbatasnya pergerakan produksi industri sehingga produktivitas industri tidak maksimal, serta mengakibatkan penurunan pendapatan industri.

- **Perspektif Customer**

Sasaran Kegiatan 2 Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 memiliki 3 Indikator Kinerja yaitu:

1. Utilisasi Pusat Industri Digital Indonesia 4.0

Pusat Industri Digital 4.0 (PIDI 4.0) memiliki visi menjadi *one stop solution* implementasi industri 4.0 dan jendela Indonesia 4.0 untuk dunia. Untuk mencapai visi tersebut PIDI 4.0 memiliki 5 layanan utama diantaranya :

1. Showcase Center, sebagai tempat untuk menyaksikan secara langsung implementasi Industri 4.0 melalui model factory & miniplant guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang industri 4.0
2. Capability Center, sebagai pusat peningkatan kompetensi SDM Industri 4.0 dari CxO, Manajer, Engineer, Frontliner bahkan ASN Pembina Industri
3. Ecosystem for Industry 4.0, sebagai wadah bagi stakeholder untuk saling berbagi dan bekerjasama dalam proses transformasi ke industri 4.0
4. Delivery Center, sebagai pusat pendampingan dan konsultasi bagi industri dalam bertransformasi ke industri 4.0

Engineering & AI Center, sebagai pusat riset dan testbed untuk mencari solusi dari pain point industri 4.0

Indikator ini merupakan persentase Utilisasi Pusat Industri Digital Indonesia 4.0 yang pengerjaannya berada dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang terdiri atas realisasi gedung, realisasi alat, dan realisasi kegiatan yang terencana

Capaian atau realisasi pada Indikator Kinerja Utilisasi Pusat Industri Digital Indonesia 4.0 sebesar 65,77% atau 131,54% dari target 50%. Indikator Kinerja Utilisasi Pusat Industri Digital Indonesia 4.0 telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Realisasi Indikator Kinerja

SP	IK	2019			2020			2021			Satuan
		T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	
Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Utilisasi Pusat Industri Digital Indonesia 4.0	15	15	100	40	46,05	115	50	65,77	131,54	Persen

Pembangunan PIDI 4.0 dilaksanakan secara Multi Years dari tahun 2019 hingga 2021. Gedung PIDI 4.0 telah melaksanakan Soft Launching pada awal Desember 2021 yang kemudian juga menjadi salah satu tempat yang ditunjuk untuk Visitasi Delegasi Sherpa G20, selanjutnya akan dilaksanakan pengerjaan interior.

Hingga 31 Desember 2021, progress konstruksi fisik PIDI 4.0 sudah selesai (100%). Selanjutnya adalah pengerjaan interior, pada tahun 2021 pengerjaan interior telah dilaksanakan di 3 lantai yaitu lantai 4,5, dan 7 dari total 8 lantai (37,50%), 5 lantai berikutnya akan dilanjutkan tahun 2022. Realisasi 5 paket alat lab (lab food and beverage, lab electronic automotive component manufacture, lab advance supply chain, lab data analitic, lab additive manufacturing), 1 paket furniture kelas, dan 1 paket furniture kantor.

Realisasi kegiatan yang terencana pada tahun 2021 yaitu Pelatihan Industri 4.0 di PIDI 4.0, Website Profil PIDI 4.0, Website Capability Center Website

Ecosystem Center, Perjanjian Kerjasama dengan Mitra. Rincian perhitungan utilitas Pusat Industri Digital Indonesia 4.0 dapat dilihat sebagai berikut:

	Nama Kegiatan	Target 2021	Realisasi 2021	Persentase	Persentase Rata-Rata	Utilisasi PIDI 4.0
Realisasi Gedung	Fisik Bangunan dan Eksterior	1 Gedung	1 Gedung	100.00%	68.75%	65.77%
	Fisik Interior	Interior Lantai 1 - 8	Interior Lantai 4, 5, dan 7	37.50%		
Realisasi Alat	Ketersediaan dan Kondisi Alat Lantai 1	1 Paket Showcase Otomotif	Tidak Ada	0.00%	23.08%	
		1 Paket Showcase F&B	Tidak Ada	0.00%		
	Ketersediaan dan Kondisi Alat Lantai 2	1 Paket Data Center	Tidak Ada	0.00%		
		1 Paket Command Center	Tidak Ada	0.00%		
		1 Paket Furnitur	Tidak Ada	0.00%		
	Ketersediaan dan Kondisi Alat Lantai 3	1 Paket Mesin Testbed	Tidak Ada	0.00%		
		1 Paket Furnitur	Tidak Ada	0.00%		
	Ketersediaan dan Kondisi Alat Lantai 4	5 Paket Alat Lab	5 Paket Alat Lab	100.00%		
		5 Paket Furnitur Lab	Tidak Ada	0.00%		
	Ketersediaan dan Kondisi Alat Lantai 5	1 Paket Furnitur Kelas	1 Paket Furnitur Kelas	100.00%		
	Ketersediaan dan Kondisi Alat Lantai 6	1 Paket Furnitur Kantor	Tidak Ada	0.00%		
	Ketersediaan dan Kondisi Alat Lantai 7	1 Paket Furnitur Kantor	1 Paket Furnitur Kantor	100.00%		
	Ketersediaan dan Kondisi Alat Lantai 8	1 Paket Furnitur Kantor	Tidak Ada	0.00%		
Realisasi Kegiatan yang Terencana	Pelatihan Industri 4.0 di PIDI 4.0	400 Orang	430 Orang	107.50%	102.50%	
	Website Profil PIDI 4.0	1 Website PIDI 4.0	1 Website PIDI 4.0	100.00%		

	Website Capability Center	1 Website Capability Center	1 Website Capability Center	100.00%		
	Website Ecosystem Center	1 Website Ecosystem Center	1 Website Ecosystem Center	100.00%		
	Perjanjian Kerjasama dengan Mitra	20 MoU	21 MoU	105.00%		

- **Perspektif Bisnis Internal Proses**

Sasaran Kegiatan 3 Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif memiliki 1 Indikator Kinerja yaitu:

1. Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan BPSDMI

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, peran pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri ke depan dilakukan secara terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan. Penyusunan regulasi bidang industri pengolahan nonmigas diharapkan dapat sejalan dengan kebijakan presiden dalam mendorong daya saing industri melalui deregulasi, debirokratisasi, serta penegakan hukum dan kepastian usaha. Oleh sebab itu setiap regulasi yang disusun oleh Kementerian Perindustrian diharapkan efektif dan mencapai tujuan dari regulasi tersebut disusun. Efektivitas regulasi yang disusun diukur melalui indikator kinerja yaitu efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Kemenperin

Indikator ini merupakan persentase antara regulasi yang telah ditetapkan di lingkungan BPSDMI dan telah diterapkan terhadap seluruh regulasi yang telah ditetapkan oleh BPSDMI.

Capaian atau realisasi pada Indikator Kinerja Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan BPSDMI sebesar 62,5% atau 86,81% dari target 72%. Dari 16 regulasi yang ditetapkan BPSDMI, yang telah diterapkan sebanyak 10 regulasi. Indikator Kinerja Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan BPSDMI belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Belum tercapainya indikator ini diantaranya disebabkan oleh masih lemahnya kesadaran industri untuk memanfaatkan KKNi serta terdapat pula sektor-sektor industri yang sedang

berproses dalam penyusunan pengembang skema dan pengembangan pembelajaran.

Realisasi Indikator Kinerja

SP	IK	2019			2020			2021			Satuan
		T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	
Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan BPSDMI	Belum menjadi Indikator Kinerja			Belum menjadi Indikator Kinerja			72	62,5	86,81	Persen

Pada tahun 2019 dan 2020, indikator ini belum dijadikan indikator kinerja oleh BPSDMI. Indikator Kinerja Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan BPSDMI baru menjadi indikator kinerja BPSDMI pada tahun 2021. Dengan rincian sebagai berikut:

No.	Dokumen KKNi	Penerapan pada LSP		Penerapan pada Unit Pendidikan/ Pelatihan	
1	KKNi Bidang Teknologi Fesyen dan Desain Fesyen	V	LSP P1 BLK Kemnaker	V	BLK Kemnaker
2	KKNi Industri Garmen	V	LSP P1 di BDI LSP Garmino Plus	V	BDI Jakarta BDI Surabaya
3	KKNi Bidang Industri Alat Berat	V	LSP ABI	V	STMI Jakarta Training Center (misal Komatsu)
4	KKNi Bidang Otomotif Subbidang Body Repair	V	LSP P1 BLK Kemnaker	V	BLK Kemnaker
5	KKNi Bidang Teknik Sepeda Motor	V	LSP P1 BLK Kemnaker	V	BLK Kemnaker
6	KKNi Industri Otomotif Subbidang Perawatan dan Perbaikan	V	LSP P1 BLK Kemnaker	V	BLK Kemnaker
7	KKNi Teknisi Refrigerasi Dan Teknisi Tata Udara	V	LSP Teknik Pendingin Tata Udara LSP Elektroteknika	V	Training Center (misal Daikin)
8	KKNi Bidang Analisis Kimia	V	LSP P1 di AKA & SMAK	V	AKA Bogor SMAK Padang SMAK Bogor SMAK Makassar
9	KKNi Bidang Jasa Pembuatan Barang-Barang dari Logam Subbidang Pengelasan	V	LSP LAS LSP P1 BLK Kemnaker	V	Training Center (misal Kampuh) BLK Kemnaker

10	KKNI Bidang Otomasi Industri	V	LSP Elektronika Indonesia LSP P1 ATI Makassar	V	ATI Makassar
11	KKNI Bidang Karoseri	Belum diterapkan	Belum diterapkan	Belum diterapkan	Belum diterapkan
12	KKNI Bidang Otomotif Subbidang Komponen				
13	KKNI Bidang Pengolahan Garam				
14	KKNI Bidang Industri Alas Kaki				
15	KKNI Bidang Elektronika Prototipe dan Pemrograman				
16	KKNI Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging Subbidang Produksi				

- **Perspektif Learn & Growth**

1. **Sasaran Kegiatan 4 Terwujudnya ASN BPSDMI yang Professional dan Berkepribadian memiliki 1 Indikator Kinerja yaitu: Rata-Rata Indeks Profesionalitas ASN BPSDMI**

Indeks profesionalitas ASN Kementerian Perindustrian adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

Indikator ini merupakan Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN BPSDMI yang di dapatkan dari Biro OSDM Kementerian Perindustrian.

Capaian atau realisasi pada Indikator Kinerja Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN BPSDMI sebesar 66,43 atau 93,56% dari nilai 71. Indikator Kinerja Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN BPSDMI belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

Realisasi Indikator Kinerja

SP	IK	2019			2020			2021			Satuan
		T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	
Terwujudnya ASN BPSDMI yang Professional dan Berkepribadian	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN BPSDMI	Belum menjadi Indikator Kinerja			Belum menjadi Indikator Kinerja			71	66,43	93,56	Indeks

Pada tahun 2019 dan 2020, indikator ini belum dijadikan indikator kinerja oleh BPSDMI. Indikator Kinerja Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN BPSDMI baru menjadi indikator kinerja BPSDMI pada tahun 2021. Belum tercapainya indikator ini diantaranya karena terdapat pegawai yang tidak melakukan updating data terkait keikutsertaan diklat (kompetensi).

Sasaran Kegiatan 5 Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri memiliki 1 Indikator Kinerja yaitu:

1. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BPSDMI

Penggunaan produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Kepres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja kementerian/lembaga. Pemanfaatan barang/jasa di dasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian. Data pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah di sepakati bersama, yaitu akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111.

Indikator ini merupakan Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BPSDMI.

Capaian atau realisasi pada Indikator Kinerja Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BPSDMI sebesar 56% atau 110 dari 50%. Indikator Kinerja Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BPSDMI telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Realisasi Indikator Kinerja

SP	IK	2019			2020			2021			Satuan
		T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	
Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BPSDMI							50	55	110,00	Persen

Pada tahun 2019 dan 2020, indikator ini belum dijadikan indikator kinerja oleh BPSDMI. Indikator Kinerja Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BPSDMI baru menjadi indikator kinerja BPSDMI pada tahun 2021. Rincian Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BPSDMI dapat dilihat sebagai berikut:

No	Satuan Kerja	Realisais p3dn 2021
1	BDI Medan	98
2	BDI Padang	99.97
3	BDI Jakarta	86
4	BDI Yogyakarta	91.66
5	BDI Surabaya	97.29
6	BDI Makassar	99.55
7	BDI Denpasar	94
8	BPSDMI	
9	SMAK Bogor	99.98
10	SMAK Padang	57
11	SMAK Makassar	71.25
12	SMTI Banda Aceh	91
13	SMTI Makassar	68
14	SMTI Yogyakarta	94.75
15	SMTI Bandar Lampung	80
16	SMTI Padang	60
17	SMTI Pontianak	95
18	Politeknik STMI Jakarta	35.23
19	Politeknik STTT Bandung	60
20	Politeknik AKA Bogor	72.76
21	Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan	88
22	Politeknik ATI Padang	99.5

23	Politeknik ATK Yogyakarta	37.46
24	Politeknik APP Jakarta	50
25	Politeknik ATI Makassar	86.67
26	Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta	99.88
27	Politeknik Industri Logam Morowali	94
28	Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu	98.9
29	Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng	88
Rata-Rata		81.92

Sasaran Kegiatan 6 Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima memiliki 3 Indikator Kinerja yaitu:

1. Nilai Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri

Laporan keuangan pada satuan kerja di lingkungan kementerian perindustrian wajib disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan masing-masing satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Penilaian atas Laporan Keuangan pada satuan kerja di lingkungan kementerian perindustrian bertujuan untuk memberikan motivasi kepada satuan kerja dan diharapkan agar setiap satuan kerja dapat menyusun Laporan Keuangan secara lengkap sesuai dengan peraturan yang berlaku serta tepat waktu.

Penilaian Laporan Keuangan dari Biro Keuangan Kementerian Perindustrian dengan lingkup yang dinilai antara lain: Kelengkapan Laporan Keuangan yang meliputi (penjelasan umum, penjelasan laporan operasional, penjelasan laporan perubahan ekuitas, pengungkapan penting lainnya), kelengkapan lampiran meliputi (lampiran BMN dan Lapiram E Rekon).

Indikator ini merupakan Nilai Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang dilaksanakan oleh Biro Keuangan Kementerian Perindustrian.

Capaian atau realisasi pada Indikator Kinerja Nilai Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri senilai 70 atau 97,22% dari nilai 72. Indikator Kinerja Nilai Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

Realisasi Indikator Kinerja

SK	IK	2019			2020			2021			Satuan
		T	R	C%	T	R	C%	T	R	C%	
Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	-	-	-	70	73	104	72	70	97,22	Nilai

2. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melaksanakan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh KemenPANRB, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja.

Penilaian SAKIP Kementerian Perindustrian dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capaiannya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran setelahnya.

Perhitungan nilai SAKIP Kementerian Perindustrian menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 12 tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dimana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Indikator ini merupakan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang dilaksanakan oleh Inspektotat Jenderal Kementerian Perindustrian khususnya Inspektorat I bagi BPSDMI.

Capaian atau realisasi pada Indikator Kinerja Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri senilai 73,15 atau 101,60% dari nilai 72. Indikator Kinerja Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Realisasi Indikator Kinerja

SK	IK	2019			2020			2021			Satuan
		T	R	C%	T	R	C%	T	R	C %	
Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	-	-	-	70	72,34	104	72	73,15	101,60	Nilai

3. Nilai kearsipan Badan Pengembangan SDM Industri

Penilaian kearsipan diselenggarakan oleh Biro Umum Kemenperin tiap tahun dengan tim penilai berasal dari arsiparis tiap satuan pusat dan satuan kerja daerah di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Indikator ini merupakan Nilai kearsipan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang dilaksanakan oleh Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia.

Capaian atau realisasi pada Indikator Kinerja Nilai Kearsipan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri senilai 69 atau 92% dari nilai 75. Indikator Kinerja Nilai Kearsipan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

Realisasi Indikator Kinerja

SP	IK	2019			2020			2021			Satuan
		T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	
Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai kearsipan Badan Pengembangan SDM Industri	Belum menjadi Indikator Kinerja			Belum menjadi Indikator Kinerja			75	69	92,00	Nilai

Pada tahun 2019 dan 2020, indikator ini belum dijadikan indikator kinerja oleh BPSDMI. Indikator Kinerja Nilai kearsipan Badan Pengembangan SDM Industri baru menjadi indikator kinerja BPSDMI pada tahun 2021.

Sasaran Kegiatan 7 Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien memiliki 2 Indikator Kinerja yaitu:

1. Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Telah Ditindaklanjuti

Indikator Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker merupakan perbandingan rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi hasil pengawasan. Tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pengawasan internal tidak sekedar pemenuhan kewajiban yang bersifat administratif. Akan tetapi, tindak lanjut yang dilaksanakan oleh unit kerja/satker bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi dikarenakan melalui tindak lanjut tersebut, unit kerja secara otomatis telah melakukan perbaikan terhadap sistem maupun akuntabilitas organisasi.

Indikator ini merupakan persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang telah Ditindaklanjuti oleh BPSDMI terhadap rekomendasi dari temuan Inpektorat Jenderal.

Capaian atau realisasi pada Indikator Kinerja Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Telah Ditindaklanjuti senilai 61,49 atau 67,60% dari nilai 75. Indikator Kinerja Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Telah Ditindaklanjuti belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

Realisasi Indikator Kinerja

SP	IK	2019			2020			2021			Satuan
		T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	
Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti	Belum menjadi Indikator Kinerja			Belum menjadi Indikator Kinerja			91,5	61,49	67,20%	Persen

Pada tahun 2019 dan 2020, indikator ini belum dijadikan indikator kinerja oleh BPSDMI. Indikator Kinerja Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti baru menjadi indikator kinerja BPSDMI pada tahun 2021. Dari 348 temuan oleh inpektorat I di lingkungan BPSMI, 214 temuan telah dilakukan tindaklanjuti, dan 214 temuan sedang dalam proses.

2. Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI)

Indeks penerapan Manajemen Risiko merupakan index untuk melihat sejauh mana penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko telah diimplementasikan oleh suatu instansi.

Dalam pelaksanaannya, tingkat penerapan prinsip-prinsip ini dinilai melalui Indeks Manajemen Risiko (MRI) dimana terdapat 5 (lima) level MRI, yaitu level 1, 2,3,4, serta 5. Masing-masing level tersebut mempunyai karakteristik masing-masing sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh BPKP.

Indikator ini merupakan indikator yang baru ditambahkan di perjanjian kinerja BPSDMI pada Desember 2021 dan belum memiliki nilai pada tahun 2021. Indikator MRI selama ini telah dilaksanakan namun hanya memiliki nilai agregat untuk tingkat kementerian yaitu 2,77. Sehingga nilai ini pula yang dijadikan capaian oleh BPSDMI.

Capaian atau realisasi pada Indikator Kinerja Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI) senilai 2,77 level atau 92,33% dari target 3 level. Indikator Kinerja Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI) belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

Realisasi Indikator Kinerja

SP	IK	2019			2020			2021			Satuan
		T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	
Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI)	Belum menjadi Indikator Kinerja			Belum menjadi Indikator Kinerja			3	2,77	92.33	Level

Pada tahun 2019 dan 2020, indikator ini belum dijadikan indikator kinerja oleh BPSDMI. Indikator Kinerja Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI) baru menjadi indikator kinerja BPSDMI pada tahun 2021.

3.2 Realisasi Anggaran 2021

Penyerapan anggaran yang dialokasikan dalam pencapaian target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat BPSDMI tahun 2021 tidak dapat dipisahkan secara terperinci antara suatu program inisiatif atau kegiatan hanya mendukung pencapaian sasaran strategis ataupun satu indikator kinerja. Hal disebabkan karena beberapa program inisiatif atau kegiatan yang dilaksanakan mendukung secara simultan untuk pencapaian beberapa sasaran strategis atau indikator kinerja. Realisasi anggaran yang belum tercapai sepenuhnya namun telah mendekati 100% yang ditetapkan ini diantaranya disebabkan oleh *refocussing* anggaran sehingga dalam pelaksanaan beberapa kegiatan menjadi terhambat.

Selama tahun 2021, realisasi anggaran Sekretariat BPSDMI adalah Rp. 130.164.615.044 dari pagu anggaran sebesar Rp. 130.509.712.000 atau sebesar 99,74% dari total pagu Tahun 2021 digunakan untuk melaksanakan untuk Program

Kegiatan	Output	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
6043 Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	6043.EAA Layanan Perkantoran	Rp 30.671.346.000	Rp 30.506.537.163
	6043.EAB Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Rp 11.188.366.000	Rp 11.020.593.496
	6043.EAD Layanan Sarana Internal	Rp 1.150.000.000	Rp 1.137.484.385
	6043.QEC Bantuan Produk	Rp 87.500.000.000	Rp 87.500.000.000

Dukungan Manajemen BPSDMI, dengan rincian sebagai berikut:

**Realisasi dan Pagu Anggaran per Indikator
Tahun Anggaran 2021**

Kode	Tujuan/Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian	Satuan	%	Pagu	Realisasi	%
Tj	Meningkatnya Peran SDM Industri dalam Perekonomian Nasional	1 Tersedianya SDM Industri yang kompeten	54.000	59.445	Orang	110.08%	1,092,007,693,000	1,080,724,431,321	98.97%
PERSPEKTIF CUSTOMER									
SK1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian SDM Industri Pengolahan Nonmigas	1 Tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas	18.29	18.65	Juta Orang	101.97%	2,513,643,000	2,450,848,545	97.50%
		2 Persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan non migas terhadap total pekerja	13.96	14.23	Persen	101.93%	3,165,902,000	3,153,929,352	99.62%
		3 Produktivitas tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas	115.46	111.47	Rp Juta /orang/ tahun	96.54%	24,063,332,000	23,193,047,181	96.38%
SK2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	1 Utilisasi Pusat Industri Digital Indonesia 4.0	50	65.77	Persen	131.54%	167,193,984,000	167,169,627,920	99.99%

PERSPEKTIF INTERNAL PROCESS										
SK3	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	1	Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan BPSDMI	72	62.5	Persen	86,81%			
PERSPEKTIF LEARN & GROWTH										
SK4	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian	1	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN BPSDMI	71	66.43	Indeks	93.56%			
SK5	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BPSDMI	50	56	Persen	110.00%	113,527,021,000	112,779,246,172	99.34%
SK6	Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	1	Nilai Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	72	70	Nilai	97.22%			
		2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	72	73.15	Nilai	101.60%			
		3	Nilai kearsipan Badan Pengembangan SDM Industri	75	69	Nilai	92.00%			

SK7	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti	91.5	61.49	Persen	67.20%			
		2	Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI)	3	2.77	Level	92.33%			
SP9	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	1	Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan BPSDMI	72	62.5	Persen	86,81%			

3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat BPSDMI berusaha memaksimalkan pencapaian kinerja, baik terhadap *output*, maupun *outcome*. Adapun salah satu upaya dalam memaksimalkan capaian tersebut adalah melaksanakan efisiensi sumber daya, agar sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara efektif untuk mencapai target kinerja dan pelayanan sesuai tugas dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan capaian efisiensi sumber daya pada Sekretariat BPSDMI, salah satunya karena adanya *refocusing/realokasi* anggaran/program/kegiatan yang disesuaikan dengan sasaran pembangunan nasional atau isu aktual terkini.

Pada awal tahun 2021, Sekretariat BPSDMI telah menetapkan Perjanjian Kinerja beserta anggaran yang menyertainya sebesar Rp. 213.141.565.000,-. Anggaran tersebut dipergunakan untuk dapat mewujudkan capaian target yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Sekretariat BPSDMI Tahun 2021.

Dengan belum selesainya masa pandemi *Covid-19* dan untuk mendukung Program Percepatan Penanggulangan Covid 19 maka dilakukan Optimalisasi Program dan Anggaran PCPEN untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Penanganan *Covid-19* di lingkungan Kementerian Perindustrian hingga menjadi sebesar Rp. 130.509.712.000,-. Dengan alokasi anggaran sebesar ini akan dapat mempengaruhi tingkat capaian target yang telah diperjanjikan. Sekretariat BPSDMI telah berusaha semaksimal mungkin dalam pelaksanaan tugasnya sehingga pada akhir tahun anggaran 2021 dapat merealisasikan 99,74 % anggarannya untuk mencapai target realisasi fisik sebesar 100 (seratus) persen dalam usaha memenuhi target Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Dari data yang tersedia secara hitungan kasar dapat diperoleh kinerja efisiensi anggaran untuk mencapai target kinerja tahun 2021 adalah :

$$\begin{aligned} \text{Persentase Kinerja} &= \frac{(\text{pagu awal}-\text{realisasi pagu akhir})}{\text{pagu awal}} \times 100 \% \\ \text{Efisiensi Anggaran} &= \frac{(213.141.565.000-130.164.615.044)}{213.141.565.000} \times 100 \% \\ &= \frac{(1-(99,74\%) \times 130.164.615.044)}{(213.141.565.000)} \times 100 \% \\ &= 60,9\% \end{aligned}$$

Sebagaimana terlihat pada perhitungan di atas, nilai kinerja efisiensi anggaran Sekretariat BPSDMI Tahun 2021 adalah sebesar 60,9 %, dimana persentase tersebut ini termasuk anggaran yang tidak terealisasi sebesar 0,26 % dari pagu akhir perubahan yaitu Rp. 130.509.712.000,-

3.4 Kendala dan Tindak Lanjut

3.4.1 Kendala

Kendala yang dihadapi Sekretariat BPSDMI Kementerian Perindustrian dalam pelaksanaan program dan tahun 2021 antara lain:

1. Secara keseluruhan hambatan dan kendala pelaksanaan sampai dengan triwulan IV memang disebabkan karena pandemi COVID-19 yang masih berlangsung terutamanya di pertengahan tahun dengan kasus yang melonjak tinggi, khususnya untuk kegiatan yang sifatnya melibatkan banyak orang dan melakukan perjalanan antar kota.
2. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan penghematan dan tidak dilaksanakan/ dihilangkan pada tahun 2021 dalam rangka realokasi anggaran dalam rangka Penanganan COVID 19, Pengadaan vaksin, masker, oksigen dan isotank.

3.4.2 Tindak Lanjut

Langkah tindak lanjut yang harus dilakukan berkaitan dengan kendala pelaksanaan antara lain:

1. Mengantisipasi adanya *refocussing* anggaran.
2. Segera menindaklanjuti kendala yang terjadi dan menyiapkan berbagai antisipasi untuk mengatasinya.
3. Pada akhir pelaksanaan kegiatan, hendaknya dilakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan sehingga permasalahan yang dihadapi dapat diantisipasi dan dilakukan perbaikan.
4. Penyesuaian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan protocol kesehatan seperti pembagian shift dan pelaksanaan kegiatan secara virtual.
5. Meningkatkan koordinasi dengan Instruktur terkait standar penyampaian materi agar sesuai dengan kurikulum dan materi uji.

6. Melaksanakan koordinasi melalui *online* dan memaksimalkan media yang tersedia.

BAB IV

P E N U T U P

Capaian kinerja Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) selama tahun anggaran 2021, relatif cukup baik meskipun ada beberapa indikator kinerja yang tidak tercapai. Namun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 beberapa indikator mengalami peningkatan. Walaupun demikian, Sekretariat BPSDMI tidak akan berpuas diri dengan pencapaian tersebut. Karena di masa yang akan datang, masih banyak tantangan yang akan dihadapi, seiring dengan adanya kebijakan-kebijakan baru khususnya di bidang pengembangan SDM Industri.

Laporan akuntabilitas kinerja tahun 2021 merupakan laporan tahun ke empat periode Renstra 2020-2024. Untuk itu diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan balikan (*feed back*), dan mendorong Aparat Sekretariat BPSDMI agar berusaha sungguh-sungguh, sehingga dapat menjadi *supporting system* dalam mewujudkan BPSDMI menjadi lembaga yang dikenal berkualitas baik, dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur dan sumber daya manusia industri di lingkungan Kementerian.

Secara umum keseluruhan capaian kinerja telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Sekretariat BPSDMI untuk selalu meningkatkan kinerja yang lebih baik di masa mendatang. Sekretariat BPSDMI akan selalu berusaha memberikan pelayanan prima, dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi mutakhir. Dan juga secara berkelanjutan akan menyediakan sarana dan prasarana yang nyaman.